

KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Kamis, 28 Maret 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Koran Tempo (halaman 24)	Kamis, 28 Maret 2019	Biaya Pembangunan Kota Baru Tanjung Selor Rp 200-300 Triliun	Pemerintahan menggenjot percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pembangunan kota baru ini didasari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2018 yang diteken pada 31 Oktober lalu. Pemerintah Kalimantan Utara akan berfokus pada pembangunan pusat pemerintahan di atas lahan seluas 560 hektare selama lima tahun ke depan. “Kami merencanakan sekitar Rp 200-300 triliun untuk pusat pemerintahan saja. Karena daerah itu masih hutan sebagian, jadi (pembangunan) memang betul-betul dari awal.” Kata Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, kemarin.
2	Media Indonesia (halaman 7)	Kamis, 28 Maret 2019	12 Kementerian Komitmen Percepat Pembangunan KBM Tanjung Selor	Sebanyak 12 kementerian/Lembaga Bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dan Pemerintah Kabupaten Bulungan sepakat untuk melaksanakan percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. Hal itu dengan ditandatanganinya komitmen Bersama pelaksanaan Instruksi Presiden (Impres) Nomor 9 Tahun 2018, tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor oleh perwakilan 12 kementerian/lembaga yang difasilitasi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian di Graha Sawala Gedung Ali Wardhana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, kemarin.
3	Media Indonesia (halaman 14)	Kamis, 28 Maret 2019	Pemerintah Bangun Pusat Ekonomi Baru	Komitmen pemerintah mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa-Bali terus digalakkan. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah fokus membangun 10 kota baru public mandiri dan terpadu. Salah satunya ialah Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor yang merupakan ibu kota Kalimantan Utara. Program pembangunan KBM Tanjung Selor itu segera direalisasikan sesuai penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan berbagai kementerian/Lembaga dalam rencana aksi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan KBM Tanjung Selor di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, kemarin.
4	Kompas (halaman 17)	Kamis, 28 Maret 2019	Tol Semarang- Demak Masih Lelang	Jalan Tol Semarang-Demak yang juga berfungsi sebagai tanggul laut masih tahap lelang. April 2019, proses lelang badan usaha jalan tol ditargetkan selesai dan dilanjutkan penetapan kontraktor hingga peletakan batu pertama. “Groundbreaking dilakukan kalau sudah ada penetapan badan usaha jalan tol (BUJT) atau investornya, lalu penetapan kontraktor. April ini bisa selesai lelang, kemudian ditentukan pemenang,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di sela-sela pelantikan Direktur dan Wakil Direktur Politeknik Pekerjaan Umum di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (27/3/2019).
5	Bisnis Indonesia (halaman 9)	Kamis, 28 Maret 2019	KEK Pariwisata Tanjung Pulisan Ditetapkan Juni	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengirimkan usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Pulisan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Persetujuan dan pengesahan Kawasan itu ditargetkan rampung pada akhir semester I/2019. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, penyerahan berkas usulan tersebut sesuai dengan instrukturnya saat berkunjung ke Sulawesi Utara pada akhir tahun lalu. Dia memperkirakan, pengusulan akan disetujui dalam waktu 1 bulan dan KEK akan ditetapkan pada Juni.
6	Bisnis Indonesia (halaman 23)	Kamis, 28 Maret 2019	JSS Dimulai Akhir 2019	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan konstruksi proyek Jakarta Sewerage System

				(JSS) atau sitem pengolahan air limbah domestic DKI Jakarta bias dimulai pada akhir 2019. Direktur Jenderal Cipta Karya, Danis H. Sumadilaga mengatakan, proyek JSS saat ini masih dalam tahap penyiapan desain zona 1 dan zona 6. Dia mengakui, penyusunan detail engine erring design (DED) sedikit mengalami keterlambatan.
7	Bisnis Indonesia (halaman 23)	Kamis, 28 Maret 2019	Proses Pemeliharaan Akan Dimulai	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal memulai pemeliharaan Jembatan Nasional Suramadu pada tahun ini, setelah status jembatan diubah menjadi jembatan bukan tol pada Oktober 2018 lalu. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto mengatakan, pemeliharaan Jembatan Suramadu sudah di lelang untuk badan usaha dan tinggal menunggu pemenang lelang.

Judul	Biaya Pembangunan Kota Baru Tanjung Selor Rp 200-300 Triliun	Tanggal	Kamis, 28 Maret 2019
Media	Koran Tempo (halaman 24)		
Resume	Pemerintahan menggenjot percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pembangunan kota baru ini didasari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2018 yang diteken pada 31 Oktober lalu. Pemerintah Kalimantan Utara akan berfokus pada pembangunan pusat pemerintahan di atas lahan seluas 560 hektare selama lima tahun ke depan. "Kami merencanakan sekitar Rp 200-300 triliun untuk pusat pemerintahan saja. Karena daerah itu masih hutan sebagian, jadi (pembangunan) memang betul-betul dari awal." Kata Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, kemarin.		



Rencana lokasi Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, Kalimantan Utara, yang pengembangannya paling lambat didanai oleh APBN tahun 2020.

Biaya Pembangunan Kota Baru Tanjung Selor Rp 200-300 Triliun

Menjadi pusat pemerintahan Kalimantan Utara.

Larissa Huda

larissa.huda@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah menggenjot percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pembangunan kota baru ini didasari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2018 yang diteken pada 31 Oktober lalu.

Pemerintah Kalimantan Utara akan berfokus pada pembangunan pusat pemerintahan di atas lahan seluas 560 hektare selama lima tahun ke depan. "Kami merencanakan sekitar Rp 200-300 triliun untuk pusat pemerintahan saja. Karena daerah itu masih hutan sebagian, jadi (pembangunan) memang betul-betul dari awal," kata Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, kemarin.

Adapun infrastruktur yang dibutuhkan adalah kantor gubernur, gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta kantor organisasi perangkat daerah, instansi vertikal

seperti komando daerah militer dan markas kepolisian daerah, dan kejaksaan tinggi. Pemerintah daerah juga membuka kesempatan kepada pihak swasta untuk terlibat, misalnya pembangunan pusat rekreasi, pusat olahraga, dan pendidikan.

Pemerintah Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan bersama perwakilan kementerian dan lembaga terkait telah menandatangani kesepakatan Rencana Aksi Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor. Irianto menuturkan keterlibatan 12 kementerian dan lembaga itu bisa mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi hingga pembebasan lahan. "Pada dasarnya sudah tidak ada masalah prinsip lagi. Tinggal bagaimana implementasi rencana aksi yang sudah disepakati," ujar Irianto.

Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor ditargetkan bisa merambah hingga 25 ribu

hektare lahan. Capaian tersebut direncanakan secara bertahap. Setelah pusat pemerintahan selesai dalam waktu lima tahun, Irianto menuturkan akan mengejar 3.000 hektare lahan lagi untuk dikembangkan. Sebagian besar, kata dia, saat ini masih berupa hutan produksi dan garapan. "Saat ini, lahan seluas 3.000 hingga 25 ribu hektare akan dilakukan pengaman karena masuk zonasi KBM Tanjung Selor. Tidak boleh digunakan tanpa izin pemda," kata Irianto.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Tanjung Selor merupakan satu dari sepuluh kota baru mandiri di luar Jawa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Adapun 10 kota baru publik mandiri yang ditargetkan adalah Padang, Palembang, Pontianak, Banjarbaru, Maja, Makassar, Manado,

Sorong, Jayapura, dan Tanjung Selor.

"Pembangunan kota-kota baru tersebut diarahkan sebagai pengendali urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa-Bali," ujar Darmin.

Darmin mengatakan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar pemerintah daerah mengambil langkah strategis maupun operasional agar pembangunan bisa berjalan lebih efektif. Salah satu langkah strategis tersebut dimulai dari merevisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan, sebagai landasan utama dalam pembangunan kota.

Lalu, menyusun rencana pembangunan secara lebih terpadu. Kemudian, mempersiapkan infrastruktur fisik dan sumber daya manusia hingga menyusun *action plan* atau rencana kerja pembangunan kota mandiri. Menurut Darmin,

koordinasi menjadi penting supaya pembangunan bisa lebih efektif dan efisien. "Artinya, tidak ada pengulangan hal-hal yang sudah dilakukan oleh kementerian atau lembaga tertentu oleh pihak lainnya," kata Darmin.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Hamdani, mengatakan keterlibatan 12 kementerian dalam rencana tersebut merupakan bentuk besarnya atensi pemerintah dalam membangun kota baru mandiri. Apalagi Tanjung Selor berbeda dengan kota yang ada di provinsi lain yang sudah ada karena pembangunannya dari nol. Untuk itu, kata dia, koordinasi antar-kementerian sangat diharapkan secara intensif.

"Kementerian Dalam Negeri mendukung rencana aksi dalam bentuk koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan, terkait dengan kelembagaan dan tata kelola berkaitan dengan perizinan," ujar Hamdani. ●

Judul	12 Kementerian Komitmen Percepat Pembangunan KBM Tanjung Selor	Tanggal	Kamis, 28 Maret 2019
Media	Media Indonesia (halaman 7)		
Resume	Sebanyak 12 kementerian/Lembaga Bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dan Pemerintah Kabupaten Bulungan sepakat untuk melaksanakan percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. Hal itu dengan ditandatanganinya komitmen Bersama pelaksanaan Instruksi Presiden (Impres) Nomor 9 Tahun 2018, tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor oleh perwakilan 12 kementerian/lembaga yang difasilitasi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian di Graha Sawala Gedung Ali Wardhana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, kemarin.		

12 Kementerian Komitmen Percepat Pembangunan KBM Tanjung Selor



SEBANYAK 12 kementerian/ lembaga bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dan Pemerintah Kabupaten Bulungan sepakat untuk melaksanakan percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor.

Hal itu dengan ditandatanganinya komitmen bersama pelaksanaan Instruksi Presiden (Impres) Nomor 9 Tahun 2018, tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor oleh perwakilan 12 kementerian/ lembaga yang difasilitasi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian di Graha Sawala Gedung Ali Wardhana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, kemarin.

Penandatanganan kesepakatan ini disaksikan langsung Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Adapun 12 kementerian/ lembaga yang bertanda tangan itu, yakni perwakilan Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/ Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PPDT), Kementerian Informasi dan Komunikasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Pertanian (Kementan), serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Selain kementerian/ lembaga, kesepakatan bersama ini juga turut ditandatangani Gubernur Kaltara Irianto Lambrie dan Bupati Bulungan H Sudjati. Atas ditandatanganinya

kesepakatan bersama ini, percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor menjadi prioritas dan komitmen untuk dapat diwujudkan melalui 12 kementerian/ lembaga tersebut. "Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden dan Wakil Presiden RI serta kementerian kabinet kerjanya yang telah mendukung rencana program pengembangan KBM Tanjung Selor, yang progresnya berlanjut pada hari ini (kemarin) dengan penandatanganan kesepakatan Rencana Aksi Pelaksanaan Impres No 9/2018 tentang Percepatan Pembangunan KBM Tanjung Selor," papar Gubernur.

Sementara itu, dalam arahannya, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kini pemerintah fokus untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Ini juga merupakan amanat RPJMN 2015-2019. "Bukan hanya kota, melainkan juga membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) serta destinasi pariwisata," ungkap Darmin dalam pidatonya.

Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa dilakukan dengan membangun 10 kota baru, di antaranya di Kaltara, Pontianak, Banjarbaru, dan lainnya. "Ini sebagai pengendali urbanisasi dari perkotaan atau metropolitan di luar Jawa dan Bali," jelasnya.

Kenapa Kaltara dipilih? Dijelaskan Darmin, secara statistik, pada 2017, indeks daya saing wilayah Kalimantan berada pada tingkat ke-3 (1.303) secara nasional. "Tingginya daya saing ini didukung oleh tingginya kualitas hidup dan infrastruktur.

Inilah yang akan menopang pengembangan KBM di Kaltara. Selain itu, KBM Tanjung Selor berada di posisi strategis yang didukung adanya Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia (Nunukan) dan infrastruktur pendukung lainnya," ungkap Darmin.

Setelah penandatanganan ini, lanjut Darmin, langkah awal yang harus dilakukan ialah merevisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan sebagai landasan utama pembangunan KBM Tanjung Selor, kemudian menyusun rencana pembangunan Tanjung Selor secara terpadu, menyusun tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif. "Selanjutnya, mempersiapkan infrastruktur fisik dan SDM yang dapat mendukung berkembangnya kota Tanjung Selor serta menyusun *action plan* untuk rencana pembangunan Kota Tanjung Selor," papar Darmin.

Darmin berharap agar segera disusun jadwal kegiatan. "Tujuannya, agar koordinasi di antara 12 kementerian/ lembaga terkait itu berjalan baik, jangan tiap-tiap pihak bergerak sendiri.

Koordinasi tersebut penting karena kegiatan akan efektif dan efisien. Kita juga harus menyusun rencana detail untuk membangun KBM Tanjung Selor yang dapat dibanggakan secara nasional juga internasional," tutupnya.

Anggarkan Rp174 miliar
Di sisi lain, untuk mempercepat realisasi pengembangan KBM Tanjung Selor, Pemprov Kaltara tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp54 miliar. Dana tersebut untuk pembangunan fasilitas penunjang dan kegiatan lain. Anggaran sebesar itu, salah satunya akan digunakan untuk memenuhi target pembebasan lahan di kawasan tersebut seluas 173,55 hektare (ha). Penganggaran itu dilakukan sejak 2017 dengan nilai pagu Rp50 miliar, dan 2018 sebesar Rp70 miliar.

"Untuk tahun ini, salah satu tindak lanjut yang akan dilakukan Pemprov Kaltara ialah menyelesaikan pembebasan lahan yang targetnya akan dihabiskan lagi seluas 173,55 ha," kata Gubernur. Sementara itu, pemerintah pusat atau 12 kementerian/ lembaga yang diinstruksikan oleh Presiden, diharapkan berperan membantu penyediaan infrastruktur dasar dan memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana perkotaan.

"Pemprov Kaltara juga telah melakukan tindak lanjut Impres KBM dengan Dirjen Tata Ruang Kementerian PUPR membahas mengenai usulan perubahan delineasi KIPI. KIPI ini terintegrasi dengan KBM Tanjung Selor, termasuk pula pembangunan PLTA Kayan. Delineasi KIPI diharapkan akan mempercepat investasi disana," ungkap Irianto. Selain itu, Pemprov juga mengajukan permohonan percepatan pendampingan revisi RTRW Kabupaten Bulungan dan pembebasan lahan KBM Tanjung Selor. (RO/S2-25)

Judul	Pemerintah Bangun Pusat Ekonomi Baru	Tanggal	Kamis, 28 Maret 2019
Media	Media Indonesia (halaman 14)		
Resume	Komitmen pemerintah mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa-Bali terus digalakkan. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah fokus membangun 10 kota baru public mandiri dan terpadu. Salah satunya ialah Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor yang merupakan ibu kota Kalimantan Utara. Program pembangunan KBM Tanjung Selor itu segera direalisasikan sesuai penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan berbagai kementerian/Lembaga dalam rencana aksi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan KBM Tanjung Selor Di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, kemarin.		

Pemerintah Bangun Pusat Ekonomi Baru

Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor di Kalimantan Utara terbilang istimewa karena dimulai dari nol baik dari rancangan maupun tata kotanya.

SATRIA SAKTI
satria@mediaindonesia.com

KOMITMEN pemerintah mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa-Bali terus digalakkan. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah fokus membangun 10 kota baru publik mandiri dan terpadu. Salah satunya ialah Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor

yang merupakan ibu kota Kalimantan Utara.

Program pembangunan KBM Tanjung Selor itu segera direalisasikan sesuai penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan berbagai kementerian/lembaga dalam rencana aksi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan KBM Tanjung Selor di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, kemarin.

"KBM Tanjung Selor berada di wilayah strategis yang didukung Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning. Program ini juga diarahkan sebagai pengendali urbanisasi di luar Pulau Jawa dan Bali," ungkap Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Pembangunan KBM Tanjung Selor ini juga istimewa jika dibandingkan dengan program yang sama di kota-kota lainnya. Hal ini lantaran pembangunan KBM Tanjung Selor dimulai dari nol baik dari rancangan tata

bangunan maupun kotanya.

Tanjung Selor memiliki luas 14.000 hektare (ha) dengan pembangunan akan difokuskan pada 550 hektare sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara dan 2.000 hektare akan dibangun fasilitas pendukungnya. Sisa lahan nantinya untuk perkembangan perekonomian dan ruang publik.

Adapun Rencana Aksi Pelaksanaan Inpres No 9/2018 mencakup perencanaan, koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan, target pelaksanaan kegiatan, percepatan perizinan, hingga skema pendanaan.

"Hal-hal tersebut disusun sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan dari tiap-tiap kementerian/lembaga terkait, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan," terang Darmin.

Inpres yang terbit pada 31 Oktober 2018 tersebut berlaku paling lama lima tahun sejak dikeluarkan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertugas melakukan koordinasi be-

serta evaluasi pelaksanaannya secara reguler dan melaporkan hasil koordinasi dan evaluasi kepada Presiden.

"Inpres ini lima tahun dan kalau diperlukan bisa diperpanjang. Namun, yang terpenting ialah koordinasi akan menjadi lebih efektif dan efisien. Artinya, tidak ada pengulangan hal-hal yang sudah dilakukan kementerian, lembaga tertentu oleh kementerian atau lembaga lainnya," tutup Darmin.

Indonesia-sentris

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie mengapresiasi pemerintah pusat yang perhatian pada provinsi termuda di Indonesia itu. Bahkan, menurut Mantan Sekda Kalimantan Timur itu, ia baru mengetahui adanya inpres yang diperuntukkan khusus pada pembangunan satu kota saja.

"Pengalaman 35 tahun saya di birokrasi, baru kali ini ada inpres yang diterbitkan khusus untuk membangun sebuah kota yang lokasinya jauh, dan ada di luar Jawa. Jadi, memang bukan lagi Jawa-sentris, melainkan Indonesia-sentris," tutur Irianto.

Irianto juga menegaskan KBM Tanjung Selor dapat menjadi wajah baru pembangunan nasional yang nantinya disegani negara tetangga.

"Dengan pembangunan ini, Malaysia khususnya Sabah tentu tidak bisa menganggap ringan lagi Republik ini," pungkas Irianto. (E-3)

Judul	Tol Semarang-Demak Masih Lelang	Tanggal	Kamis, 28 Maret 2019
Media	Kompas (halaman 17)		
Resume	Jalan Tol Semarang-Demak yang juga berfungsi sebagai tanggul laut masih tahap lelang. April 2019, proses lelang badan usaha jalan tol ditargetkan selesai dan dilanjutkan penetapan kontraktor hingga peletakan batu pertama. "Groundbreaking dilakukan kalau sudah ada penetapan badan usaha jalan tol (BUJT) atau investornya, lalu penetapan kontraktor. April ini bisa selesai lelang, kemudian ditentukan pemenang," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di sela-sela pelantikan Direktur dan Wakil Direktur Politeknik Pekerjaan Umum di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (27/3/2019).		

INFRASTRUKTUR

Tol Semarang-Demak Masih Lelang

SEMARANG, KOMPAS — Jalan Tol Semarang-Demak yang juga berfungsi sebagai tanggul laut masih tahap lelang. April 2019, proses lelang badan usaha jalan tol ditargetkan selesai dan dilanjutkan penetapan kontraktor hingga peletakan batu pertama.

"Groundbreaking dilakukan kalau sudah ada penetapan badan usaha jalan tol (BUJT) atau investornya, lalu penetapan kontraktor. April ini bisa selesai lelang, kemudian ditentukan pemenang," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di sela-sela pelantikan Direktur dan Wakil Direktur Politeknik Pekerjaan Umum di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (27/3/2019).

Tol Semarang-Demak akan terintegrasi tanggul laut Kota Semarang dengan total panjang 26,8 kilometer. Tanggul itu berfungsi menahan limpasan air laut atau rob yang menjadi ma-

salah di Kota Semarang. Biaya investasi Rp 15,3 triliun.

Jalan Tol Semarang-Demak akan tersambung Tol Semarang (dalam kota) yang telah beroperasi. Jalan tol baru itu akan membentang di utara jalan nasional (pantura) Semarang-Demak. Jalan tol akan berakhir di sekitar Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Jalan itu diharapkan mengurangi kepadatan kendaraan di sekitar Jalan Kaligawe, Genuk, yang dilewati truk, bus, dan kendaraan pribadi jalur Semarang-Surabaya. Selain karena lubang jalan di beberapa titik, kemacetan dalam sepekan terakhir terjadi juga karena antrean truk yang hendak ber-

putar balik.

Terkait pembebasan lahan, Basuki optimistis tidak akan terlalu banyak memakan waktu dan memberi dampak sosial karena sebagian besar konstruksi tol itu di wilayah laut.

Jalan Tol Semarang-Demak masuk proyek strategis nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Semarang Akhmad Cahyadi menambahkan, jalan tol ada di atas tanggul. (DIT)

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jaringan Transmisi 500 kV New Aur Duri - Peranap (Paket-1), terdapat 1 lokasi Tapak Tower No. T.018, yang berada di:

Kelurahan : Pijoan
Kecamatan : Jambi Luar Kota
Kabupaten : Muaro Jambi



Judul	KEK Pariwisata Tanjung Pulisan Ditetapkan Juni	Tanggal	Kamis, 28 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 9)		
Resume	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengirimkan usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Pulisan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Persetujuan dan pengesahan Kawasan itu ditargetkan rampung pada akhir semester I/2019. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, penyerahan berkas usulan tersebut sesuai dengan instrukturnya saat berkunjung ke Sulawesi Utara pada akhir tahun lalu. Dia memperkirakan, pengusulan akan disetujui dalam waktu 1 bulan dan KEK akan ditetapkan pada Juni.		

► KAWASAN EKONOMI KHUSUS

KEK Pariwisata Tanjung Pulisan Ditetapkan Juni

Bisnis, MANADO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengirimkan usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Pulisan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Persetujuan dan pengesahan kawasan itu ditargetkan rampung pada akhir semester I/2019.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, penyerahan berkas usulan tersebut sesuai dengan instruksinya saat berkunjung ke Sulawesi Utara pada akhir tahun lalu. Dia memperkirakan, pengusulan akan disetujui dalam waktu 1 bulan dan KEK akan ditetapkan pada Juni.

“Selesai saya tetapkan 1 bulan setelah sekarang, meskipun saya tahu penandatanganan akan lama, tetapi saya konfirmasikan bahwa Juni saya harapkan Sulut [Sulawesi Utara] telah memiliki KEK Pariwisata pertama, ya itu KEK Pariwisata Tanjung Pulisan,” katanya di Manado, Rabu (27/3).

Dalam perencanaan ke depan, PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD) bersama pemerintah daerah harus memenuhi sejumlah syarat rencana pengembangan yang meliputi Atraksi, Akses, dan Amenities (3A).

Dia menilai, aspek atraksi dan

akses relatif sudah terpenuhi dengan adanya destinasi wisata di sana dan akses transportasi yang ada. Dia juga akan mendorong PT Angkasa Pura I (Persero) untuk segera merealisasikan rencana perpanjangan landasan pacu Bandara Sam Ratulangi menjadi 3.000 meter.

Arief mengatakan, Angkasa Pura I memiliki anggaran belanja modal yang cukup besar pada tahun ini, mencapai sekitar Rp85 triliun. Menurutnya, pengelola harus dapat meyakinkan perseroan agar mengalokasikan sebagian dana jumbo tersebut untuk peningkatan kapasitas bandara itu.

“Selain itu, yang paling penting saya ingin KEK ini menjadi *hub* untuk *yacht*, perahu pesiar, nanti acara-acara sail international akan kita lewatkan di sini, itu yang harus dilakukan oleh teman-teman dari [pemerintah] daerah,” tambahnya.

Dia menjelaskan, proses mendapatkan status KEK memang tidak mudah. Namun, status tersebut akan memberikan berbagai kemudahan pengembangan potensi pariwisata di daerah Tanjung Pulisan, baik dari sisi perizinan maupun insentif perpajakan.

(Ilman A. Sudarwan)

Judul	JSS Dimulai Akhir 2019	Tanggal	Kamis, 28 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 23)		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan konstruksi proyek Jakarta Sewerage System (JSS) atau sistem pengolahan air limbah domestik DKI Jakarta bisa dimulai pada akhir 2019. Direktur Jenderal Cipta Karya, Danis H. Sumadilaga mengatakan, proyek JSS saat ini masih dalam tahap penyiapan desain zona 1 dan zona 6. Dia mengakui, penyusunan detail engineering design (DED) sedikit mengalami keterlambatan.		

► KONSTRUKSI PENGOLAHAN AIR LIMBAH

JSS Dimulai Akhir 2019

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan konstruksi proyek Jakarta Sewerage System (JSS) atau sistem pengolahan air limbah domestik DKI Jakarta bisa dimulai pada akhir 2019.

Rivki Maulana & Rizka P. Kharini
redaksi@bisnis.com

Direktur Jenderal Cipta Karya, Danis H. Sumadilaga mengatakan, proyek JSS saat ini masih dalam tahap penyiapan desain zona 1 dan zona 6. Dia mengakui, penyusunan detail engineering design (DED) sedikit mengalami keterlambatan.

Semula, DED untuk zona 1 diproyeksi rampung pada Maret 2019. DED ini akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan lelang pekerjaan fisik, mulai dari instalasi pengolahan air limbah (IPAL) hingga jaringan pipanya.

"DED-nya masih dalam proses. Akhir tahun ini kami harapkan bisa memulai konstruksi setelah proses lelang 6 bulan," ujarnya kepada *Bisnis*, Selasa (26/3).

Untuk diketahui, Zona 1 akan dibangun di Pluit, Jakarta Utara dengan kapasitas mencapai 198.000 meter kubik per hari. Investasi untuk pembangunan Zona 1 mencapai Rp8,5 triliun. Di Zona 6, fasilitas pengolahan air limbah akan dibangun di bilangan Duri Kosambi dengan kapasitas 282.000 meter kubik per hari.

Zona 1 dan Zona 6 adalah dua zona prioritas dari 15 zona pengolahan air limbah Jakarta. Pendanaan akan berasal dari pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA). Rencananya, JICA akan mengucurkan pinjaman untuk proyek JSS sebesar US\$903,6 juta, terdiri dari US\$622 juta untuk Zona 1 dan US\$281,6 juta untuk Zona 6.

JSS merupakan bagian dari proyek strategis nasional (PSN). Proyek ini amat penting untuk meningkatkan cakupan wilayah pengolahan air limbah yang saat ini hanya 4% dengan tingkat pencemaran Biological Oxygen Demand (BOD) 84 mg/L. Pencemaran terjadi karena air limbah rumah tangga langsung dibuang ke sungai.

Berdasarkan informasi dari laman Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPIP), tingkat layanan sanitasi Jakarta menempati posisi kedua terendah dibandingkan

dengan sembilan ibu kota negara di Asia Tenggara.

Pembangunan Zona 1 dan Zona 6 diproyeksi meningkatkan cakupan pelayanan air limbah Jakarta menjadi 20%. Sementara itu, bila 15 zona pengolahan air limbah rampung, cakupan pelayanan diperkirakan bisa mencapai 90%. Proyeksi ini diharapkan bisa terwujud pada 2035.

BENDUNGAN RAJUI

Sementara itu, pembangunan jaringan irigasi untuk bendungan Rajui, Aceh ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.

Direktur Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi mengatakan bahwa penyelesaian pembangunan jaringan irigasi di Bendungan Rajui memang tidak bersamaan dengan pembangunan Bendungan Rajui yang sudah selesai pada 2016.

"Rajui pembangunan irigasinya sudah masuk tahun kedua sekarang, dan mestinya akhir tahun ini jaringannya sudah selesai," ujarnya kepada *Bisnis*, pekan lalu.

Sebagai informasi, Bendungan Rajui terletak di Desa Masjid Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Aceh.

Bendungan yang mulai dibangun pada awal 2011 dan selesai pada 2016 itu membutuhkan biaya sebesar Rp110,65 miliar.

Dengan luas genangan 33,6 hektare, bendungan ini diharapkan mampu menampung air sebanyak 2,67 juta meter kubik untuk mengairi areal persawahan seluas 4.790 hektare, sehingga mendukung program swasembada pangan dan juga untuk meningkatkan penyediaan air baku.

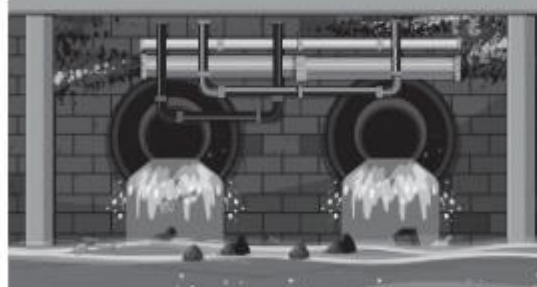
Selain itu, lokasi Bendungan Rajui yang berada di kaki lembah Seulawah, Kabupaten Pidie, Aceh, membuatnya terlihat asri dan terbelang masih sangat alami, sehingga juga menjadi salah satu destinasi wisata baru.

Menurut pria yang akrab disapa Yogi ini, dengan adanya jaringan irigasi membuat musim tanam pertanian bukan hanya di musim penghujan. "Kalau hanya bendungan, pemanfaatannya hanya pada musim penghujan saja. Kalau ada sistem irigasi setiap musim kemarau maupun penghujan dia bisa tanam," katanya.

Menurut data ditjen SDA, untuk pembangunan jaringan irigasi di bendungan Rajui dengan areal 1.000 ha dilakukan konstruksi oleh PT Andes-



Profil Jakarta Sewerage System (JSS)



JSS merupakan bagian dari proyek strategis nasional (PSN). Proyek ini amat penting untuk meningkatkan cakupan wilayah pengolahan air limbah yang saat ini hanya 4% dengan tingkat pencemaran Biological Oxygen Demand (BOD) 84 mg/L. Proyek ini menjadi bagian pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Sistem ini nantinya akan mampu mengolah limbah domestik rumah tangga.

Cara kerjanya, limbah dari rumah tangga akan disalurkan melalui perpipaan kemudian dibawa ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Jadi, sebelum dibuang ke sungai, limbah rumah tangga akan diproses dulu di IPAL.

Zona	Luas (Ha)	Kapasitas	Biaya Investasi	Lokasi
Zona 1	4,9	198.000 m ³ /hari	Rp8,1 triliun	Pluit
Zona 6	5,8	282.000 m ³ /hari	Rp8,7 triliun	Duri Kosambi

Sumber: Ditjen PUPR, 2018

SIKAD/ANASTYOGIA

mont Sakti dengan kontrak Rp106 miliar dan supervisi oleh Inako dengan kontrak Rp5,6 miliar.

Adapun target tahun 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk pembangunan irigasi (permukaan, rawa, dan tambak) terbagi menjadi dua yakni pembangunan irigasi 42 ribu hektare di DI Lhok Guci, Komering, Baliase, Kaluku. Lalu rehabilitasi irigasi seluas

120 ribu hektare di DI Batanghari, Cijung, Serayu, Tapin, Gumbasa.

Menurut data Kementerian PUPR, pada 2015—2018, pemerintah telah membangun 860.015 hektare jaringan irigasi.

Tahun ini ditargetkan pembangunan 139.410 hektare jaringan irigasi, sehingga total jaringan irigasi terbangun hingga 2019 seluas 999.425 hektare. ■

► **Detail engineering design proyek JSS mengalami keterlambatan, sehingga saat ini masih dalam tahap penyiapan desain zona 1 dan zona 6.**

Judul	Proses Pemeliharaan Akan Dimulai	Tanggal	Kamis, 28 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 23)		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal memulai pemeliharaan Jembatan Nasional Suramadu pada tahun ini, setelah status jembatan diubah menjadi jembatan bukan tol pada Oktober 2018 lalu. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto mengatakan, pemeliharaan Jembatan Suramadu sudah di lelang untuk badan usaha dan tinggal menunggu pemenang lelang.		

► JEMBATAN SURAMADU

Proses Pemeliharaan Akan Dimulai

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) bakal memulai pemeliharaan Jembatan Nasional Suramadu pada tahun ini, setelah status jembatan diubah menjadi jembatan bukan tol pada Oktober 2018 lalu.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto mengatakan, pemeliharaan Jembatan Suramadu sudah dilelang untuk badan usaha dan tinggal menunggu pemenang lelang.

"Nilainya relatif tidak terlalu besar sehingga tidak membebani anggaran juga," ujarnya kepada *Bisnis*, Selasa (26/3).

Berdasarkan layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE Kementerian PUPR, paket pemeliharaan Jembatan Suramadu telah dilelang sejak Februari 2019 dengan harga perkiraan sendiri senilai Rp35,78 miliar.

Adapun, pengumuman pemenang dijadwalkan berlangsung pada 29 Maret 2019 sedangkan kontraknya pada 10 April 2019.

Sugiyartanto mengatakan, pihaknya sudah mempelajari seluruh aspek pemeliharaan sebelum status Jembatan Suramadu diubah menjadi jembatan bukan tol.

Dia menambahkan, pihaknya juga sudah mengecek kondisi Jembatan Suramadu yang sudah beroperasi 9 tahun sejak pertama kali dibuka.

Sebelumnya, Jembatan Suramadu sepanjang 5,43 kilometer itu sudah bisa dilalui masyarakat tanpa perlu lagi membayar tarif. Pembebasan tarif tol tertuang dalam Peraturan Presiden No. 98/2018.

Pembebasan tarif diharapkan bisa memangkas biaya logistik sehingga meningkatkan perekonomian di Pulau Madura yang saat ini tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Timur.

Dalam catatan *Bisnis*, upaya menekan biaya penggunaan Jembatan Surabaya sudah dilakukan sejak 3 tahun lalu.

Pada 2016 pemerintah membebaskan tarif untuk pengguna sepeda motor dan menurunkan tarif hingga 50% untuk pengguna kendaraan roda empat atau lebih.

Sugiyartanto mengatakan, penghapusan tarif tol pada ruas atau jembatan yang dibiayai negara lebih mudah dilakukan karena tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga. Terlebih, penghapusan tarif tol di Jembatan Suramadu bukanlah yang pertama. *(Rivki Maulana)*